

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN TOBA 2023



INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN TOBA 2023

<https://tobakab.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN TOBA**

**INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
KABUPATEN TOBA 2023**

No. Publikasi : 12060.24029
Katalog : 4102002.1206
Ukuran Buku : 21 cm X 29,7 cm
Jumlah Halaman : xii + 61 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Toba

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Toba

Gambar Kulit:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Toba

Ilustrasi:

freepik.com, flaticon.com

Diterbitkan oleh:

© Badan Pusat Statistik Kabupaten Toba

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasi-kan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

TIM PENYUSUN

**INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
KABUPATEN TOBA 2023**

Pengarah:

Sabar Alberto Harianja, S.Si, MM

Penanggung Jawab Teknis:

Sartika C.Y. Pardede, SST, MM

Editor:

Sartika C.Y. Pardede, SST, MM

Penulis:

Jenni Hariaty Tarigan, S.Tr.Stat.

Tata Letak:

Jenni Hariaty Tarigan, S.Tr.Stat.

Cover:

Eirene Debora Simanullang, SST

KATA PENGANTAR

Publikasi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Toba 2023 diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Toba. Publikasi ini disajikan dalam bentuk analisis singkat dan padat yang memuat hasil atau capaian pembangunan manusia di Kabupaten Toba yang mencakup aspek pembangunan dibidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

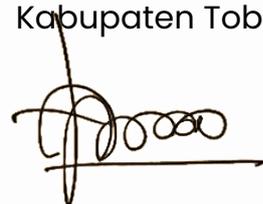
Pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan penghidupan yang layak. Semua indikator yang merepresentasikan ketiga dimensi ini terangkum dalam satu nilai tunggal, yaitu angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Pada tahun 2014, Badan Pusat Statistik secara resmi menghitung IPM dengan metode baru. Untuk menjaga kesinambungan series angka IPM metode baru, maka dilakukan *backcasting* IPM tahun 2010 sampai dengan 2013. Publikasi ini menampilkan data runtun waktu mengenai perkembangan pembangunan manusia di Toba.

Semoga publikasi capaian pembangunan manusia Toba yang berjudul "Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Toba 2023" ini bermanfaat bagi semua kalangan yang berkepentingan, termasuk masyarakat pengguna sebagai bahan rujukan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan saran dan masukan untuk perbaikan publikasi ini.

Balige, Oktober 2024

Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Toba



Sabar Alberto Harianja, S.Si, MM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Sejarah Pembangunan Manusia	3
1.2. Konsep Dasar Pembangunan Manusia	4
1.3. Pembangunan Manusia sebagai Perluasan Pilihan	6
1.4. Pengukuran Pembangunan Manusia	8
1.5. Manfaat Indeks Pembangunan Manusia	9
1.6. Pembangunan Manusia dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	10
1.7. Ruang Lingkup Penyusunan Publikasi	12
BAB II INOVASI DALAM PENGUKURAN PEMBANGUNAN MANUSIA	
2.1. Perkembangan Metodologi IPM	17
2.2. Alasan Perubahan Metodologi IPM	20
2.3. Keunggulan IPM Metode Baru	21
2.4. Indikator Komponen Penyusunan IPM Metode Baru	22
BAB III PENYUSUNAN IPM METODE BARU	
3.1. IPM Metode Baru	27
3.2. Komponen IPM	29
3.3. Perhitungan IPM	35
3.4. Besaran Skala Indeks Pembangunan Manusia	36
BAB IV PERKEMBANGAN IPM DI KABUPATEN TOBA	
4.1. Capaian Pembangunan Manusia Kabupaten Toba	39
4.2. Perbandingan Capaian Pembangunan Manusia Kabupaten Toba di Sumatera Utara dan di Kawasan Danau Toba	41
4.3. Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat	43
4.4. Dimensi Pengetahuan	46
4.5. Dimensi Standar Hidup Layak	51
LAMPIRAN	53

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Perbedaan Indikator Metode Lama dan Metode Baru	27
Tabel 3.2. Daftar 66 Komoditi Makanan	32
Tabel 3.3. Daftar 30 Komoditi Bukan Makanan	34

<https://tobakab.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Perkembangan perhitungan IPM	19
Gambar 4.1.	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Toba Tahun 2020-2023 Menggunakan UHH Hasil LF-SP2020	39
Gambar 4.2.	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Toba Tahun 2020-2023 Menggunakan UHH Hasil LF-SP2020	40
Gambar 4.3.	Perbandingan Capaian Pembangunan Manusia di Sumatera Utara Tahun 2023	41
Gambar 4.4.	Indeks Pembangunan Manusia di Kawasan Danau Toba Tahun 2022-2023	42
Gambar 4.5.	Perkembangan UHH Kabupaten Toba Tahun 2020-2023 (Tahun)	44
Gambar 4.6.	Umur Harapan Hidup Kabupaten di Kawasan Danau Toba Tahun 2022 dan 2023 (Tahun)	45
Gambar 4.7.	Perkembangan HLS Kabupaten Toba Tahun 2020-2023 (Tahun)	47
Gambar 4.8.	HLS Kabupaten di Kawasan Danau Toba Tahun 2022 dan 2023 (Tahun)	48
Gambar 4.9.	Perkembangan RLS Kabupaten Toba Tahun 2020-2023 (Tahun)	49
Gambar 4.10.	RLS Kabupaten di Kawasan Danau Toba Tahun 2022 dan 2023 (Tahun)	50
Gambar 4.11.	Perkembangan Pengeluaran Riil per Kapita Kabupaten Toba Tahun 2022-2023 (Ribu Rupiah)	51
Gambar 4.12.	Pengeluaran Riil per Kapita Kabupaten di Kawasan Danau Toba Tahun 2022 dan 2023 (Ribu Rupiah)	52

PENDAHULUAN

I

Dimensi Dasar Pengukuran IPM

Umur
Panjang dan
Hidup Sehat

Pengetahuan

Standar
Hidup Layak





BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Sejarah Pembangunan Manusia

Pada dasarnya konsep pembangunan manusia telah mengalami perubahan yang signifikan dari waktu ke waktu. Pada pandangan terdahulu disebutkan bahwa pembangunan manusia hanya berkonsentrasi pada pemenuhan kebutuhan fisik manusia seperti makanan, air, tempat tinggal, dan pakaian dengan tujuan agar manusia dapat bertahan dan melanjutkan hidup (Sen, 1999). Pada abad pertengahan, pembangunan manusia lebih berfokus pada kemajuan spiritual dan moral. Hal tersebut didasari oleh tujuan mencapai kehidupan yang lebih baik di akhirat (Alatas, 1977). Sementara itu, pada abad pencerahan, pembangunan manusia lebih berfokus pada kemajuan intelektual dengan tujuan untuk menciptakan masyarakat terdidik dan rasional. Pada abad modern awal, pembangunan manusia mulai terpusat pada kemajuan ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup manusia (Sen, 1999). Namun, saat ini konsep pembangunan manusia mengalami perkembangan dengan cakupan yang senantiasa meluas untuk mencapai kesejahteraan manusia secara menyeluruh dan berkelanjutan. Tujuan pembangunan manusia adalah untuk memperbaiki kualitas hidup manusia pada seluruh aspek kehidupan termasuk kesehatan, pendidikan, pekerjaan, akses terhadap sumber daya, dan keadilan sosial (*United Nation Development Programme, 2022*). Dengan demikian, sejarah pembangunan manusia menunjukkan bahwa terdapat banyak faktor yang memengaruhi pembangunan manusia, yakni tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, tetapi juga oleh perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang berkembang di masyarakat.

1.2. Konsep Dasar Pembangunan Manusia

Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif (*Human Development Report, 1990*). Konsep pembangunan tidak lagi dipandang sebagai fenomena ekonomi dengan ukuran keberhasilan dari tinggi rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi. Makna pembangunan senantiasa berkembang dengan cakupan yang luas. Pandangan ekonomi baru memaknai pembangunan sebagai sebagai proses perbaikan yang sifatnya multidimensional dan berkesinambungan dari masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik. Perbaikan kualitas kehidupan memang mensyaratkan adanya pendapatan yang lebih tinggi, tetapi masih terdapat syarat-syarat lain yang juga harus diperjuangkan seperti kualitas pendidikan yang lebih baik, peningkatan nutrisi dan kesehatan, pemberantasan kemiskinan, perbaikan kualitas lingkungan hidup, pemerataan kesempatan, peningkatan kebebasan individu serta pelestarian aneka ragam budaya (Bank Dunia, 2001). Todaro dan Smith (2006) menyatakan bahwa proses pembangunan tidak lagi hanya sekadar merepresentasikan aspek ekonomi dalam mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menyangkut pada perubahan-perubahan mendasar pada struktur atau tatanan sosial, sikap masyarakat dan institusi nasional, penanganan ketimpangan pendapatan serta pengentasan kemiskinan.

Pada dasarnya konsep pembangunan manusia mencakup dimensi pembangunan yang sangat luas. Pembangunan manusia lebih luas dari pembangunan yang hanya menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi saja. Konsep pembangunan manusia muncul untuk memperbaiki kelemahan konsep pertumbuhan ekonomi. Pembangunan manusia berarti

pembangunan yang berpusat pada manusia. UNDP menekankan bahwa maksud dari pembangunan manusia tersebut adalah menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan bukan sebagai alat pembangunan. Ide dasar dari pembangunan manusia adalah memposisikan manusia sebagai aset bangsa yang sesungguhnya serta mampu menciptakan pertumbuhan yang positif pada seluruh aspek kehidupan seperti aspek sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lingkungan sehingga diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, fokus utama dari pembangunan manusia adalah manusia dan kesejahteraannya.

Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan dengan manusia sebagai sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan, yakni peningkatan derajat kesehatan (usia hidup panjang dan sehat), peningkatan pendidikan (kemampuan baca tulis dan keterampilan untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi), dan tercapainya penguasaan terhadap sumber daya (pendapatan untuk mencapai hidup layak) untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Menurut UNDP (1995), paradigma pembangunan manusia mengandung empat komponen utama, Keempat komponen tersebut, antara lain:

1. Produktivitas

Manusia harus berkemampuan dalam meningkatkan produktivitas dan turut berpartisipasi penuh dalam proses mencari penghasilan juga pekerjaan yang menciptakan pendapatan. Oleh karena itu, produktivitas merupakan salah satu bagian dari model pembangunan manusia.

2. Pemerataan

Setiap penduduk harus memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses sumber daya. Semua hambatan terhadap peluang

mengakses sumber daya tersebut harus dihapuskan sehingga seluruh penduduk dapat berpartisipasi dan mendapatkan keuntungan yang dapat meningkatkan kualitas hidup.

3. Kestinambungan atau keberlanjutan

Akses terhadap peluang harus tersedia bukan hanya untuk generasi sekarang, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Semua sumber daya fisik harus dapat diperbaharui.

4. Pemberdayaan

Pembangunan harus dilakukan oleh semua penduduk bukan untuk semua penduduk. Seluruh masyarakat harus berpartisipasi penuh dalam pengambilan keputusan dan proses-proses yang mempengaruhi kehidupan mereka. Pembangunan manusia atau peningkatan kualitas SDM merupakan hal penting dan menjadi suatu kebutuhan dalam suatu pembangunan di suatu wilayah.

1.3. Pembangunan Manusia sebagai Perluasan Pilihan

Pembangunan manusia diartikan sebagai proses perluasan pilihan individu dalam memenuhi kebutuhan dasarnya seperti makanan, pendidikan, kesehatan, dan hak-hak dasar lainnya (Sen, 1990). Pada konsep pembangunan manusia, keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari kemajuan ekonomi saja, tetapi juga dari kemampuan individu untuk mengakses sumber daya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak. Perluasan pilihan individu dapat terjadi ketika seseorang memiliki cara hidup yang diinginkannya termasuk dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan pangan. Dengan kata lain, tujuan dari pembangunan manusia adalah meningkatkan kualitas hidup individu dan masyarakat secara keseluruhan dengan

memperluas pilihan mereka dalam mengakses sumber daya dan memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak (UNDP, 2015).

Pendekatan pembangunan manusia lebih menekankan kepada perluasan pilihan masyarakat untuk hidup dengan bebas dan bermartabat. Artinya, pembangunan manusia tidak hanya memperhatikan sektor sosial, tetapi juga merupakan pendekatan yang komprehensif dari semua sektor. Pada prinsipnya, pilihan manusia sangat banyak jumlahnya dan berubah setiap saat. Akan tetapi, terdapat tiga pilihan yang paling mendasar, antara lain berumur panjang dan hidup sehat, memperoleh pendidikan, dan memiliki akses terhadap sumber-sumber kebutuhan hidup secara layak. Apabila ketiga pilihan mendasar tersebut tidak dapat dimiliki, maka pilihan lain tidak dapat diakses. Selain ketiga pilihan mendasar tersebut juga terdapat pilihan tambahan lainnya mulai dari politik, kebebasan ekonomi, dan kebebasan sosial sehingga memiliki peluang untuk menjadi kreatif dan produktif.

Perluasan pilihan bagi manusia berarti upaya untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Untuk itu, sebagai contoh, semakin tinggi pendidikan seseorang, maka harapannya semakin banyak pulalah peluang-peluang yang dapat diraih. Tingkat pendidikan yang tinggi akan menentukan kemampuan dalam menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang bermuara kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan manusia bukan hanya memperhatikan peningkatan kemampuan manusia seperti peningkatan kesehatan dan berumur panjang serta peningkatan pada akses terhadap pendidikan, tetapi juga mementingkan apa yang dapat dilakukan manusia dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menikmati kehidupan, melakukan kegiatan produktif atau ikut serta dalam berbagai kegiatan budaya dan sosial politik.

1.4. Pengukuran Pembangunan Manusia

Jika dikaitkan kembali antara konsep pembangunan yang masih konvensional dengan pembangunan manusia, kedua konsep tersebut ternyata saling berkaitan satu sama lain. Konsep klasik pembangunan adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia merupakan hubungan dua arah (*dual causation*) (Ranis, Stewart, & Ramirez, 2000), dimana pertumbuhan ekonomi meningkatkan pembangunan manusia namun disisi lain peningkatan pembangunan manusia memungkinkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Model pertumbuhan ekonomi lebih menekankan pada peningkatan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) dibandingkan dengan memperbaiki kualitas hidup manusia. Pembangunan sumber daya manusia cenderung memperlakukan manusia sebagai input proses produksi. Sementara itu, pendekatan kesejahteraan memperlakukan manusia sebagai penerima dan bukan sebagai agen perubahan pembangunan. Adapun pendekatan kebutuhan dasar berfokus pada penyediaan barang dan jasa untuk kelompok masyarakat tertinggal dan bukan memperluas pilihan yang dimiliki manusia di segala bidang.

Pembangunan manusia merupakan proses jangka panjang yang menempatkan pembangunan di sekeliling manusia dan bukan manusia di sekeliling pembangunan. Pendekatan pembangunan manusia menggabungkan aspek produksi dan distribusi komoditas, serta peningkatan dan pemanfaatan kemampuan manusia. Pembangunan manusia memandang secara bersamaan keseluruhan isu dalam masyarakat seperti pertumbuhan ekonomi, perdagangan, ketenagakerjaan, kebebasan politik, ataupun nilai-nilai kultural dari sudut pandang manusia. Tak hanya itu, pembangunan manusia juga mencakup isu penting lainnya, seperti isu gender. Dengan demikian,

pembangunan manusia tidak hanya memperhatikan sektor sosial, tetapi juga memperhatikan keseluruhan sektor secara komprehensif.

Untuk mengidentifikasi pencapaian atau keberhasilan kinerja pembangunan manusia suatu wilayah, maka diperlukan suatu indikator yang mampu merangkum berbagai aspek dalam pembangunan manusia secara berkelanjutan. Untuk itu, pada tahun 1990 UNDP merilis suatu indikator, yakni *Human Development Index (HDI)* atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator IPM tersebut telah menjadi salah satu alat ukur terhadap kinerja pembangunan manusia suatu wilayah sehingga mampu mencerminkan progres kemajuan wilayah tersebut. IPM merupakan salah satu parameter penentu kualitas pembangunan manusia yang mengukur keberhasilan pembangunan. Indonesia telah menyediakan data IPM hingga level kabupaten/kota oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sehingga dapat dilakukan perbandingan antar wilayah level kabupaten/kota.

1.5. Manfaat Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator yang mampu memberikan gambaran umum dari pencapaian pembangunan yang dicapai oleh suatu wilayah. Selain itu, IPM juga dapat digunakan sebagai dasar penentuan prioritas yang ingin dicapai oleh suatu wilayah. Pencapaian pembangunan yang dimaksud adalah pembangunan berwawasan manusia, yakni pembangunan dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup manusia. Hal tersebut sejalan dengan salah satu misi pemerintah Kabupaten Toba Tahun 2019-2024, yakni membangun kualitas sumber daya masyarakat Toba yang cerdas, sehat, dan berbudaya serta berdaya saing.

Manfaat dari perhitungan IPM di suatu wilayah, antara lain:

1. IPM merupakan indikator penting pengukuran keberhasilan pembangunan kualitas hidup penduduk
2. IPM dapat diperbandingkan antar wilayah sehingga dapat menentukan peringkat atau level dari pembangunan suatu wilayah
3. IPM untuk Indonesia merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu indikator pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU). DAU diharapkan dapat memperkecil kesenjangan antar wilayah serta mampu mendorong pembangunan di suatu wilayah
4. IPM juga memungkinkan untuk mengidentifikasi masalah dan tantangan khusus yang dihadapi oleh suatu wilayah untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan

1.6. Pembangunan Manusia dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Seluruh pembangunan mengacu pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs terdiri atas tiga pilar mendasar, yakni pilar sosial, pilar ekonomi, dan pilar lingkungan. Tiga pilar utama tersebut menjadi indikator dalam pembentukan konsep pengembangan SDGs. Berdasarkan ketiga pilar tersebut dirincikan menjadi tujuh belas tujuan. Tiga dari tujuh belas tujuan pada SDGs tersebut memiliki hubungan yang erat dengan pembangunan manusia, yakni tujuan ketiga, tujuan keempat, dan tujuan kedelapan. Tujuan ketiga adalah menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk segala usia. Tujuan keempat

adalah menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua. Tujuan kedelapan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak untuk semua.

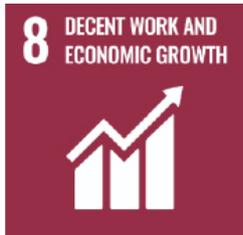


Tujuan ketiga adalah menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia. Salah satu target pada tujuan ketiga adalah mengurangi risiko Angka Kematian Ibu (AKI). Selain itu, juga terdapat target mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah dengan menurunkan Angka Kematian Neonatal (AKN). Target pada tujuan ketiga berkaitan dengan salah satu indikator IPM, yakni Umur Harapan Hidup (UHH). Apabila AKI dan AKN dapat ditekan guna mencapai target tersebut, maka UHH juga akan meningkat.



Tujuan keempat adalah menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Salah satu target pada tujuan keempat adalah memastikan bahwa anak perempuan dan anak laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif. Target pada tujuan keempat berkaitan dengan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Apabila angka partisipasi dalam

pendidikan meningkat, maka RLS dan HLS juga turut akan meningkat.



Tujuan kedelapan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua. Salah satu indikator pada target tujuan kedelapan ini adalah Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita. Apabila angka PDB per kapita meningkat, maka secara tidak langsung juga akan meningkatkan pengeluaran per kapita.

1.7. Ruang Lingkup Penyusunan Publikasi

Pembangunan manusia dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi hal prioritas. Penekanan terhadap pentingnya peningkatan SDM dalam pembangunan menjadi suatu kebutuhan. Kualitas SDM yang tangguh pada suatu wilayah akan berperan besar dalam menentukan keberhasilan pembangunan wilayah tersebut. IPM merupakan salah satu indikator penting yang dapat digunakan dalam perencanaan kebijakan dan evaluasi pembangunan. Hadirnya IPM sebagai bagian dari ukuran pembangunan merupakan akibat dari bergesernya kebijakan pembangunan yang terukur terhadap peningkatan kualitas SDM. Hal tersebut disebabkan apabila kebijakan pembangunan suatu daerah tidak mendorong peningkatan kualitas SDM, maka akan membuat daerah tersebut tertinggal dibandingkan daerah lain.

Ukuran pembangunan manusia baik nasional maupun daerah termasuk Kabupaten Toba menjadi hal yang penting dalam perancangan

dan strategi pembangunan yang berkelanjutan. Artinya, pembangunan yang tepat sasaran dan berkualitas akan dapat dicapai apabila disertai dengan kebijakan peningkatan pembangunan manusia. Perancangan arah kebijakan tersebut tentu membutuhkan ketersediaan data yang memadai dan berkualitas sehingga dapat dilakukan analisis yang lebih lanjut. Dengan demikian, akan diperoleh hasil pembangunan dengan SDM yang berkualitas di Kabupaten Toba. Penyusunan publikasi IPM Kabupaten Toba Tahun 2023 bertujuan untuk menggambarkan perkembangan pembangunan manusia di Kabupaten Toba serta menggambarkan sejauh mana dampak pembangunan yang dilaksanakan terhadap peningkatan kualitas SDM. Selain itu, publikasi dapat dijadikan bahan ataupun acuan dalam merancang kebijakan pembangunan yang sinergis terhadap peningkatan kualitas SDM. Publikasi juga diharapkan dapat membantu kebutuhan informasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan khususnya berkaitan dengan program-program pembangunan oleh pemerintah.

INOVASI DALAM PENGUKURAN PEMBANGUNAN MANUSIA

II

Usia Hidup

Angka Harapan Hidup adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir



Standar Hidup Layak

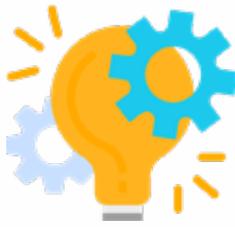
Pengeluaran per kapita adalah rata-rata biaya yang dikeluarkan rumah tangga sebulan



Pengetahuan

Rata Rata Lama Sekolah adalah jumlah tahun untuk menjalani pendidikan
Harapan Lama Sekolah adalah lama sekolah yang diharapkan dapat dirasakan





BAB II

INOVASI DALAM PENGUKURAN PEMBANGUNAN MANUSIA

2.1. Perkembangan Metodologi IPM

Sejalan dengan pilihan mendasar dari manusia, maka UNDP dalam mengukur pembangunan manusia disusun oleh tiga dimensi dasar, antara lain dimensi umur panjang dan hidup sehat, dimensi pengetahuan, dan dimensi standar hidup layak. Ketiga dimensi dasar tersebut dirangkum dalam suatu indeks komposit yang disebut dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Ketiga dimensi pembentuk IPM tersebut diturunkan menjadi empat indikator, yakni dimensi umur panjang dan hidup sehat diukur dengan Umur Harapan Hidup (UHH). Dimensi pengetahuan atau pendidikan diukur dengan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Sementara itu, dimensi standar hidup layak diukur dengan pengeluaran per kapita (PNB per kapita). Keempat indikator turunan dimensi dasar tersebut digunakan dalam proses perhitungan IPM. Indikator IPM ini akan mampu menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses sumber daya dalam memenuhi kebutuhan dasar mulai dari aspek kesehatan, pendidikan, pendapatan, dan sebagainya. Metodologi yang digunakan oleh UNDP diadopsi BPS sejak tahun 2014. BPS menggunakan perhitungan IPM metode baru dengan penyesuaian beberapa indikator. Penyesuaian dilakukan berkaitan dengan ketersediaan data sampai level kabupaten/kota. Dengan demikian, IPM Indonesia perhitungan UNDP dan BPS tidak dapat diperbandingkan.

Secara berkala UNDP telah melakukan penyempurnaan dalam perhitungan IPM. Tahun 1990 UNDP memperkenalkan suatu indeks komposit yang mampu mengukur pembangunan manusia yang disebut dengan Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan

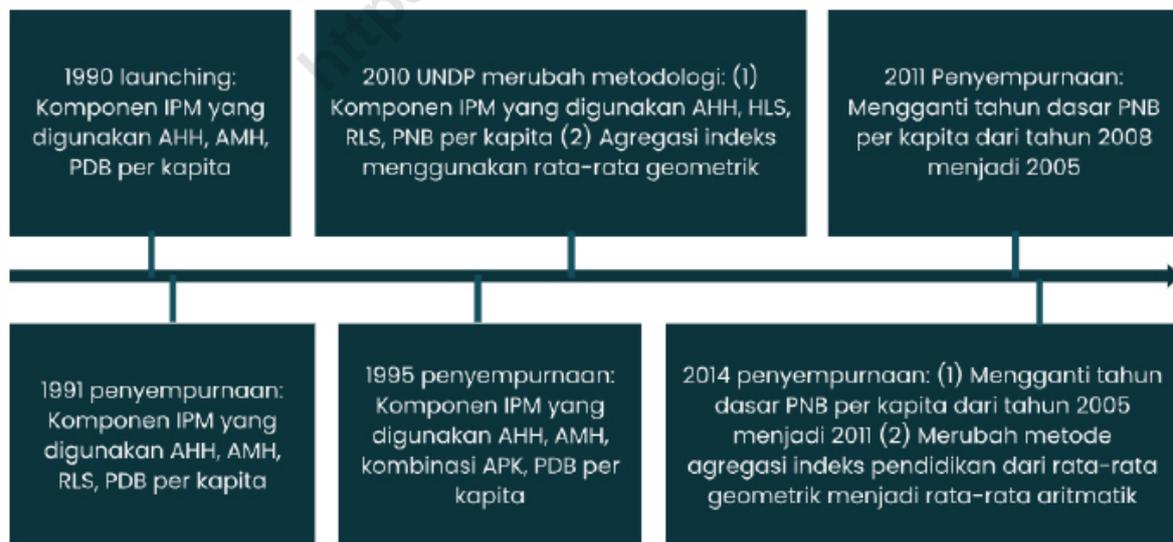
Manusia (IPM). Indeks tersebut secara rutin dipublikasikan setiap tahun dalam Laporan Pembangunan Manusia (Human Development Report). Perhitungan IPM pada saat tersebut dihitung melalui dimensi umur panjang dan hidup sehat dengan pendekatan angka harapan hidup saat lahir, dimensi pengetahuan dengan pendekatan Angka Melek Huruf (AMH) dewasa. Sementara itu, untuk dimensi standar hidup layak dengan pendekatan PDB per kapita. Untuk menghitung ketiga dimensi tersebut menjadi sebuah indeks komposit, maka digunakan rata-rata aritmatik.

Kemudian, UNDP melakukan penyempurnaan metode perhitungan IPM pada tahun 1991 dengan menambahkan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) ke dalam dimensi pengetahuan. Artinya, terdapat dua indikator dalam dimensi pengetahuan, yakni AMH dan RLS. Kedua indikator tersebut memiliki bobot yang berbeda, yakni AMH dengan bobot dua per tiga sementara RLS dengan bobot satu per tiga. Tahun 1995 UNDP kembali melakukan penyempurnaan metode perhitungan IPM. UNDP melakukan pergantian indikator RLS menjadi kombinasi Angka Partisipasi Kasar (APK) pada dimensi pengetahuan atau pendidikan dengan pembobotan yang sama seperti sebelumnya. Tahun 2010 terjadi perbaikan metode perhitungan baru yang cukup signifikan oleh UNDP. Perbaikan tersebut disebut dengan era baru pembangunan manusia. Perbaikan dilakukan dengan tetap menggunakan tiga dimensi dasar yang sama, tetapi dengan indikator yang lebih relevan dan metode agregasi yang berbeda. Perubahan tersebut mencakup beberapa indikator agar menjadi lebih relevan. Indikator AMH diganti menjadi Harapan Lama Sekolah (HLS). Indikator Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti menjadi Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Selain itu, metode untuk menghitung indeks komposit, yakni rata-rata aritmatik diganti menjadi rata-rata geometrik.

Penyempurnaan metode perhitungan IPM dilakukan kembali tahun

2011, yakni perubahan tahun dasar PNB per kapita dari tahun 2008 menjadi tahun 2005. Tiga tahun berselang, tahun 2014 UNDP kembali melakukan penyempurnaan, yakni tahun dasar PNB per kapita dari tahun 2005 menjadi tahun 2011 dan metode agregasi dimensi pengetahuan atau pendidikan diubah dari rata-rata geometrik menjadi aritmatik. Perubahan-perubahan yang dilakukan UNDP tersebut bertujuan untuk membentuk suatu indeks komposit yang relevan dalam mengukur pembangunan manusia.

Indonesia mulai menghitung IPM setiap tiga tahun sekali sejak 1996. Mulai tahun 2004 IPM dihitung setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan data Kementerian Keuangan dalam menghitung Dana Alokasi Umum (DAU). Sementara itu, sejak tahun 2014, indikator dalam perhitungan IPM di Indonesia sudah mengacu pada metode baru yang diterapkan oleh UNDP dengan beberapa penyesuaian. Penyesuaian menjadi penting dilakukan dikarenakan keterbatasan pada ketersediaan data sampai level kabupaten/kota.



Gambar 2.1. Perkembangan perhitungan IPM

2.2 Alasan Perubahan Metodologi IPM

Pada dasarnya perubahan metodologi perhitungan IPM merupakan penyesuaian terhadap kondisi sosial dan perekonomian dunia. Selain itu, perubahan metode juga berkaitan erat dengan perkembangan riset dan teknologi dalam menganalisis kualitas pembangunan manusia baik di bidang kesehatan, pendidikan, maupun di bidang pemerataan pendapatan masyarakat. Berikut ini adalah alasan-alasan yang dijadikan dasar perubahan metodologi IPM, yakni:

1. Beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam perhitungan IPM seperti Angka Melek Huruf (AMH). AMH sudah tidak relevan dalam menggambarkan kualitas pendidikan secara utuh. Hal tersebut disebabkan bahwa AMH di sebagian besar daerah sudah tinggi sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik. Artinya, indikator yang tidak sensitif membedakan menyebabkan indikator komposit juga menjadi tidak relevan.
2. Selain itu, indikator lain yang juga tidak tepat dalam perhitungan IPM adalah PDB per kapita. Pada dasarnya PDB per kapita merupakan pendekatan dari pendapatan masyarakat. Namun, PDB per kapita tidak mampu menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Hal tersebut disebabkan PDB tidak hanya dilakukan oleh masyarakat secara mikro, tetapi juga diciptakan oleh faktor lainnya seperti investasi asing. Dengan kata lain, PDB merupakan indikator menggambarkan kondisi perekonomian secara lebih luas termasuk investasi asing yang hanya menyentuh kondisi perekonomian beberapa masyarakat saja.
3. Penggunaan metode rata-rata aritmatik dalam penghitungan

agregasi indeks komposit IPM akan menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi pada dimensi lain. Untuk itu, perhitungan IPM metode baru menggunakan rata-rata geometrik. Pada dasarnya penggunaan metode rata-rata geometrik cenderung lebih sensitif terhadap ketimpangan dibandingkan rata-rata aritmatik. Hal tersebut juga akan sejalan dengan konsep pada pembangunan, yakni pemerataan pembangunan dengan meredam ketimpangan pembangunan.

2.3. Keunggulan IPM Metode Baru

Beberapa keunggulan penghitungan IPM metode baru, antara lain:

1. Menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik (diskriminatif)
 - a. Indikator RLS dan HLS mampu menggambarkan dimensi pengetahuan yang lebih relevan
 - b. PNB lebih mampu menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah dibandingkan dengan PDB
2. Penggunaan rata-rata geometrik dalam penyusunan IPM dapat diartikan bahwa capaian suatu dimensi tertentu tidak dapat ditutupi oleh capaian dimensi lain. Dengan kata lain, untuk mendapatkan indeks pembangunan manusia yang tinggi, maka harus berfokus pada ketiga dimensi dasar manusia.

2.4. Indikator Komponen Penyusunan IPM Metode Baru

Indikator komponen penyusunan IPM metode baru dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Umur Harapan Hidup (UHH) merupakan rata-rata perkiraan banyaknya tahun yang dapat ditempuh seseorang sejak lahir. UHH mampu mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat yang dapat diperoleh dari hasil Long Form Sensus Penduduk Tahun 2022 (LFSP-2020)
2. Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan rata-rata lamanya sekolah dalam tahun yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa yang akan datang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Cakupan penduduk yang dihitung pada HLS adalah penduduk usia 7 tahun atau lebih karena mengikuti kebijakan pemerintah, yaitu program wajib belajar. Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam SUSENAS, maka HLS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren. Sumber data pesantren yang digunakan berasal dari Direktorat Pendidikan Islam.

Formula perhitungan HLS:

$$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

Keterangan:

HLS_a^t : Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t

E_i^t : Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t

P_i^t : Jumlah penduduk usia i pada tahun t

i : usia ($a, a+1, \dots, n$)

FK : Faktor koreksi pesantren

3. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal dengan asumsi bahwa dalam kondisi normal angka RLS tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam RLS adalah penduduk berumur 25 tahun atau lebih. Artinya, RLS hanya dihitung untuk penduduk berusia 25 tahun ke atas dengan asumsi bahwa pada penduduk dengan usia tersebut telah mengakhiri proses pendidikan. Usia 25 tahun tersebut merupakan standar yang digunakan oleh UNDP.
4. Pengeluaran per Kapita ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity/PPP*). Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas Modul yang dihitung dari level provinsi hingga level kabupaten/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas non makanan dengan menggunakan Metode Rao dalam perhitungannya. Paket komoditas dalam perhitungan PPP dipilih sebanyak 96 jenis. Hal tersebut dengan mempertimbangkan kontribusi 27 komoditas pada metode lama yang terus mengalami penurunan dari 37,52 persen tahun 1996 menjadi 24,66 persen tahun 2012.

PENYUSUNAN IPM METODE BARU

III

IPM 77,83

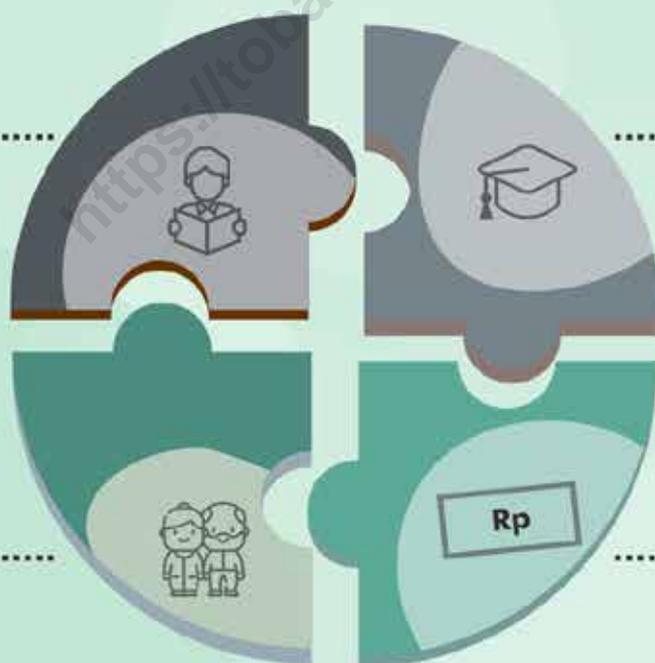
TAHUN 2023

Rata-Rata Lama Sekolah

10,59 Tahun

Harapan Lama Sekolah

13,59 Tahun



Umur Harapan Hidup

74,22 Tahun

Pengeluaran per Kapita

Rp **12.676** Ribu



BAB III PENYUSUNAN IPM METODE BARU

3.1. IPM Metode Baru

Perubahan mendasar perhitungan IPM berdampak pada dua hal, antara lain perubahan level IPM dan perubahan peringkat IPM. Secara umum, level IPM metode baru lebih rendah dibandingkan dengan level IPM metode lama. Hal tersebut boleh terjadi disebabkan perubahan indikator dan metode perhitungan seperti pergantian Angka Melek Huruf (AMH) ke Harapan Lama Sekolah (HLS), yakni AMH sudah berada di atas angka 90 persen sedangkan HLS belum cukup optimal. Selain itu, perubahan metode agregasi indikator komposit dari rata-rata aritmatika ke geometri memiliki andil dalam penurunan level IPM metode baru. Ketimpangan dimensi akan mengakibatkan level IPM lebih rendah.

Tabel 3.1. Perbedaan Indikator Metode Lama dan Metode Baru

Dimensi	Metode Lama	Metode Baru
(1)	(2)	(3)
Umur Panjang dan Hidup Sehat	Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH)	Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH)
Pengetahuan	Angka Melek Huruf (AMH) dan Kombinasi Angka Partisipasi Kasar (APK)	Harapan Lama Sekolah (HLS) Penduduk 7 Tahun ke Atas dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Penduduk 25 Tahun ke Atas
Standar Hidup Layak	PDB per kapita	Pengeluaran Riil per Kapita

Perubahan indikator dan metode perhitungan berdampak pada perubahan peringkat IPM. Perubahan indikator akan berdampak pada indeks dimensi. Sementara itu, perubahan metode perhitungan berdampak signifikan pada agregasi indeks. Peringkat IPM dengan dua metode yang berbeda tidak dapat diperbandingkan.

Pada tahun 2014 Indonesia secara resmi melakukan perhitungan dengan metode yang baru. Sumber data yang digunakan, antara lain:

1. Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) untuk penduduk 7 tahun ke atas bersumber dari Sensus Penduduk 2010 atau Long Form - Sensus Penduduk 2020.
2. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) untuk penduduk 25 tahun ke atas bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).
3. Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan bersumber dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

BPS menggunakan perhitungan IPM metode baru dengan melakukan penyesuaian terhadap beberapa indikator. Penyesuaian dilakukan terhadap indikator Angka Melek Huruf (AMH) dan Produk Domestik Bruto (PDB). Kedua indikator ini sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. AMH sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antardaerah dengan baik. Sementara itu, PDB per kapita tidak tepat karena tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.

3.2. Komponen IPM

IPM disusun oleh tiga dimensi dengan komponen sebagai berikut:

1. Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

UNDP menetapkan bahwa dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator umur harapan hidup saat lahir. Hal tersebut disebabkan oleh ketersediaan data secara umum. Umur harapan hidup saat lahir (UHH) merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Perhitungan umur harapan hidup dilakukan melalui pendekatan tak langsung (indirect estimation), yakni menggunakan data Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup dengan paket program Mortpack. Selanjutnya, pemilihan metode Trussel dengan metode West yang sesuai dengan kondisi kependudukan Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara umumnya.

Umur harapan hidup dapat dihitung berdasarkan nilai maksimum dan nilai minimum harapan hidup sesuai standar UNDP, yakni angka tertinggi sebagai batas atas untuk perhitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah sebagai batas bawah 20 tahun. Kemudian, indeks kesehatan (dimensi umur panjang dan hidup sehat) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$I_{Kesehatan} = \frac{UHH - UHH_{min}}{UHH_{maks} - UHH_{min}} \quad (1)$$

Indikator UHH tidak mengalami perubahan pada metode baru. Namun, sumber data yang digunakan pada indikator tersebut diperbaharui yang sebelumnya menggunakan hasil Sensus Penduduk 2010 dan sekarang menggunakan hasil Long Form -

Sensus Penduduk 2020. Indikator UHH berperan dalam menentukan derajat kesehatan suatu masyarakat. Indikator UHH juga relevan keberadaannya dengan ketersediaan data yang memadai hingga level kabupaten/kota.

2. Dimensi Pengetahuan

Dimensi pengetahuan diukur melalui tingkat pendidikan. Indikator yang digunakan adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). RLS merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Alasan penggunaan penduduk 25 tahun dikarenakan bahwa pada umumnya penduduk berusia 25 tahun ke atas sudah tidak bersekolah lagi. Berdasarkan kesepakatan UNDP dalam perhitungan RLS, batas maksimum RLS adalah 15 tahun dan batas minimum 0 tahun. HLS merupakan lamanya sekolah yang diharapkan akan dilalui oleh anak umur tertentu di masa mendatang dalam tahun. HLS dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS juga memiliki batasan maksimum dan minimum sesuai kesepakatan UNDP, yakni 18 tahun dan 0 tahun. Pada proses pembentukan IPM baik RLS maupun HLS diberikan bobot yang sama. Lalu, kedua indikator tersebut digabungkan menjadi dimensi pendidikan.

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}} \quad (2)$$

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}} \quad (3)$$

$$I_{Pendidikan} = \frac{I_{RLS} + I_{HLS}}{2} \quad (4)$$

3. Dimensi Standar Hidup Layak

Dimensi lain dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak. Standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dapat dinikmati oleh penduduk sebagai dampak dari semakin membaiknya kondisi perekonomian. UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita yang disesuaikan sedangkan BPS menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan paritas daya beli berbasis formula Rao. Penggunaan PNB per kapita lebih menggambarkan kesejahteraan masyarakat dibandingkan dengan pengeluaran per kapita, tetapi data tersebut tidak tersedia hingga level kabupaten/kota.

$$PPP_j = \prod_{i=1}^m \left(\frac{P_{ij}}{P_{ik}} \right)^{\frac{1}{m}} \quad (5)$$

Keterangan:

PPP_j : Paritas daya beli di wilayah j

P_{ij} : Harga komoditas i di kabupaten/kota j

P_{ik} : Harga komoditas i di Jakarta Selatan

m : Jumlah komoditas

Perhitungan paritas daya beli pada metode baru dilakukan terhadap 96 komoditas kebutuhan pokok dengan 66 komoditas

makanan dan sisanya komoditas non makanan. Jumlah komoditas tersebut meningkat disebabkan telah terjadi banyak perubahan pola konsumsi masyarakat sehingga komoditas perhitungan paritas daya beli juga diperbaharui. Batas maksimum pengeluaran per kapita sebesar Rp26.572.352 dengan batas minimum sebesar Rp1.007.436. Formula yang digunakan dalam perhitungan indeks pengeluaran (dimensi standar hidup layak) adalah sebagai berikut:

$$I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran})_{\min}}{\ln(\text{pengeluaran})_{\max} - \ln(\text{pengeluaran})_{\min}} \quad (6)$$

Tabel 3.2. Daftar 66 Komoditi Makanan

No	Komoditi	No	Komoditi
(1)	(2)	(1)	(2)
1	Beras	34	Pepaya
2	Tepung terigu	35	Minyak kelapa
3	Ketela pohon/singkong	36	Minyak goreng lainnya
4	Kentang	37	Kelapa
5	Tongkol/tuna/cakalang	38	Gula pasir
6	Kembung	39	Teh
7	Bandeng	40	Kopi
8	Mujair	41	Garam
9	Mas	42	Kecap
10	Lele	43	Penyedap masakan/vetsin
11	Ikan segar lainnya	44	Mie instan

No	Komoditi	No	Komoditi
(1)	(2)	(1)	(2)
12	Daging sapi	45	Roti manis/roti lainnya
13	Daging ayam ras	46	Kue kering
14	Daging ayam kampung	47	Kue basah
15	Telur ayam ras	48	Makanan gorengan
16	Susu kental manis	49	Gado-gado/ketoprak
17	Susu bubuk	50	Nasi campur/rames
18	Susu bubuk bayi	51	Nasi goreng
19	Bayam	52	Nasi putih
20	Kangkung	53	Lontong/ketupat sayur
21	Kacang panjang	54	Soto/gule/sop/rawon/ cincang
22	Bawang merah	55	Sate/tongseng
23	Bawang putih	56	Mie bakso/mie rebus/mie goreng
24	Cabe merah	57	Makanan ringan anak
25	Cabe rawit	58	Ikang (goreng/bakar dll)
26	Tahu	59	Ayam/daging (goreng dll)
27	Tempe	60	Makanan jadi lainnya
28	Jeruk	61	Air kemasan galon
29	Mangga	62	Minuman jadi lainnya
30	Salak	63	Es lainnya
31	Pisang ambon	64	Rokok kretek filter
32	Pisang raja	65	Rokok kretek tanpa filter
33	Pisang lainnya	66	Rokok putih

Tabel 3.3. Daftar 30 Komoditi Bukan Makanan

No	Komoditi	No	Komoditi
(1)	(2)	(1)	(2)
1	Rumah sendiri/bebas sewa	16	Pepaya
2	Rumah kontrak	17	Minyak kelapa
3	Rumah sewa	18	Minyak goreng lainnya
4	Rumah dinas	19	Kelapa
5	Listrik	20	Gula pasir
6	Air PAM	21	Teh
7	LPG	22	Kopi
8	Minyak tanah	23	Garam
9	Lainnya(batu baterai, aki, korek, obat nyamuk, dll)	24	Kecap
10	Perlengkapan mandi	25	Penyedap masakan/vetsin
11	Barang kecantikan	26	Mie instan
12	Perawatan kulit, wajah, kuku, rambut	27	Roti manis/roti lainnya
13	Sabun cuci	28	Kue kering
14	Biaya RS Pemerintah	29	Kue basah
15	Biaya RS Swasta	30	Makanan gorengan

3.3. Perhitungan IPM

Perhitungan IPM dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Menghitung indeks masing-masing komponen IPM

$$\text{Indeks } (X_i) = \frac{X_i - X_{\min}}{X_{\max} - X_{\min}} \quad (7)$$

Keterangan:

X_i : Indeks dimensi pembangunan manusia

X_{\min} : Batas minimum indeks pembangunan manusia

X_{\max} : Batas maksimum indeks pembangunan manusia

i : Dimensi pembangunan manusia

Penentuan nilai batas minimum dan maksimum menggunakan standar yang ditetapkan oleh UNDP dengan tujuan keterbandingan global kecuali dimensi standar hidup layak karena menggunakan satuan rupiah. Berikut merupakan batas minimum dan maksimum indikator komponen IPM:

2. Tahap berikutnya adalah menghitung rata-rata geometrik dari masing-masing indeks dimensi, yakni pada persamaan (1), persamaan (4), dan persamaan (6). Perhitungan IPM dilakukan sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks pengeluaran sebagai berikut:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}} \times 100 \quad (8)$$

3. Berikutnya menghitung pertumbuhan IPM yang digunakan untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM

$$\text{Pertumbuhan IPM} = \frac{IPM_t - IPM_{t-1}}{IPM_{t-1}} \times 100 \quad (7)$$

Keterangan:

IPMt : IPM pada tahun t

IPMt-1 : IPM pada tahun t-1

3.4. Besaran Skala Indeks Pembangunan Manusia

Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dikelompokkan menjadi empat kelompok. Tujuan dari pengelompokan tersebut adalah untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia.

1. Kelompok sangat tinggi : $IPM \geq 80$
2. Kelompok tinggi : $70 \leq IPM < 80$
3. Kelompok sedang : $60 \leq IPM < 70$
4. Kelompok rendah : $IPM < 60$

PERKEMBANGAN IPM DI KABUPATEN TOBA

IV

IPM KABUPATEN TOBA 2020-2023

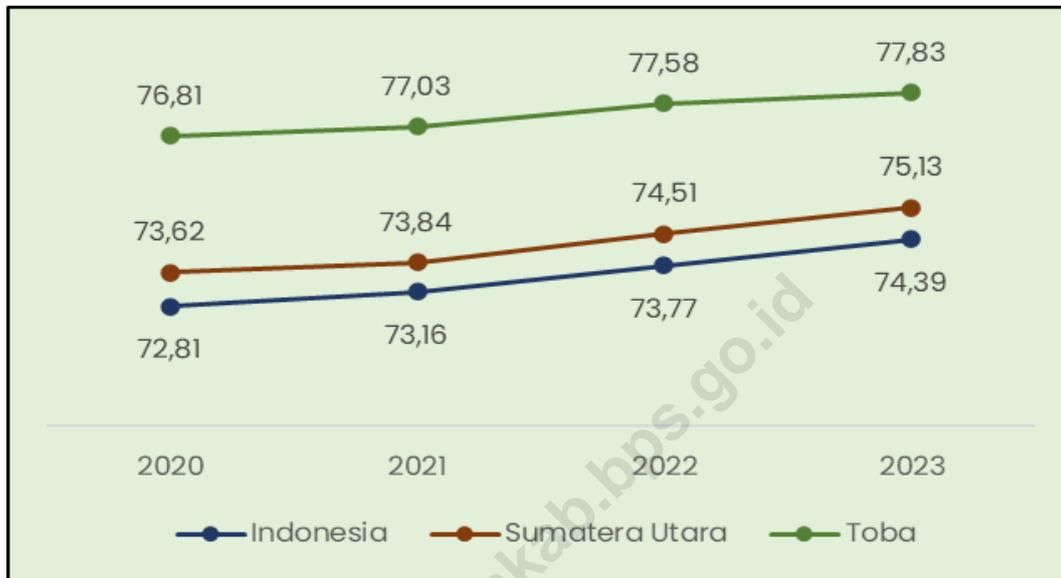


“IPM Kabupaten Toba berada pada kategori **TINGGI** dan merupakan IPM tertinggi ke-**ENAM** di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara”



BAB IV PERKEMBANGAN IPM DI KABUPATEN TOBA

4.1. Capaian Pembangunan Manusia Kabupaten Toba



Gambar 4.1. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Toba Tahun 2020–2023 Menggunakan UHH Hasil LF–SP2020

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah. Berdasarkan Gambar 4.1 dapat dilihat bahwa perkembangan IPM Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, dan Indonesia selama periode tahun 2020 hingga tahun 2023 mengalami pertumbuhan yang positif. Hal tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan manusia secara umum baik skala regional maupun nasional di Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, dan Indonesia terus mengalami kemajuan, bahkan disaat pandemi Covid-19 melanda. Dari Gambar 4.1 juga dapat dilihat bahwa IPM Kabupaten Toba sudah berada di atas IPM Provinsi Sumatera Utara maupun IPM secara nasional di Indonesia.

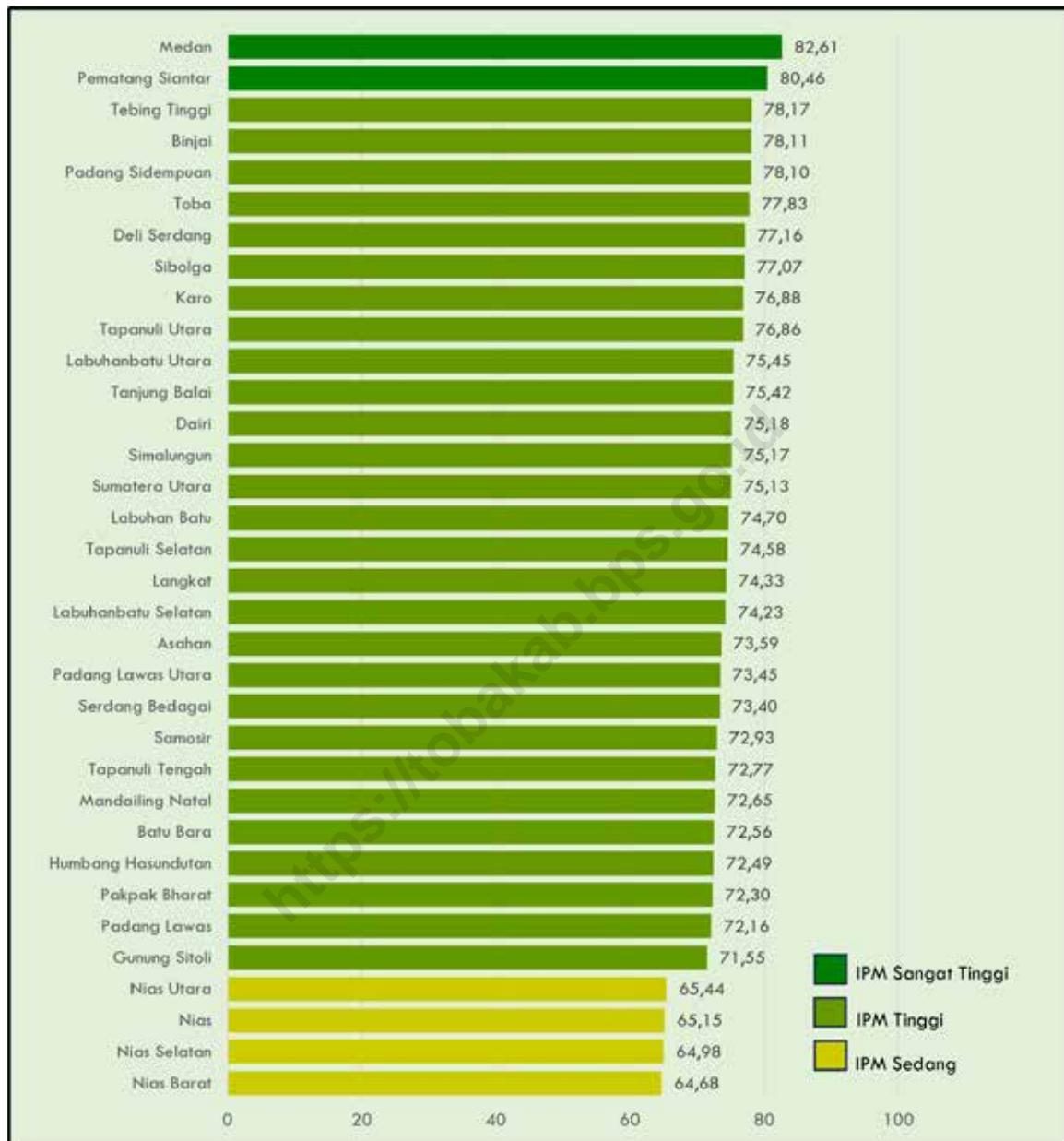


Gambar 4.2. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Toba Tahun 2020–2023 Menggunakan UHH Hasil LF–SP2020

Pembangunan manusia di Kabupaten Toba cenderung mengalami kemajuan yang cukup signifikan setiap tahunnya yang dapat dilihat melalui Gambar 4.2. Akan tetapi, pertumbuhan IPM pada tahun 2023 mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan IPM Kabupaten Toba pada tahun 2022 mencapai peningkatan sebesar 0,71 persen. Sedangkan pada tahun 2023 IPM Kabupaten Toba meningkat sebesar 0,32 persen dari 77,58 pada tahun 2022 menjadi 77,83 pada tahun 2023, atau meningkat sebesar 0,25 satuan.

Status pembangunan manusia menjadi salah satu indikator perkembangan pembangunan manusia dalam suatu wilayah, status pembangunan manusia di Kabupaten Toba berada di level tinggi yaitu di antara 70 hingga 80 selama periode tahun 2020–2023. Capaian peningkatan IPM tersebut menunjukkan indikasi positif bahwa kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Toba dari aspek pendapatan, pendidikan, dan kesehatan semakin baik.

4.2. Perbandingan Capaian Pembangunan Manusia Kabupaten Toba di Sumatera Utara dan di Kawasan Danau Toba

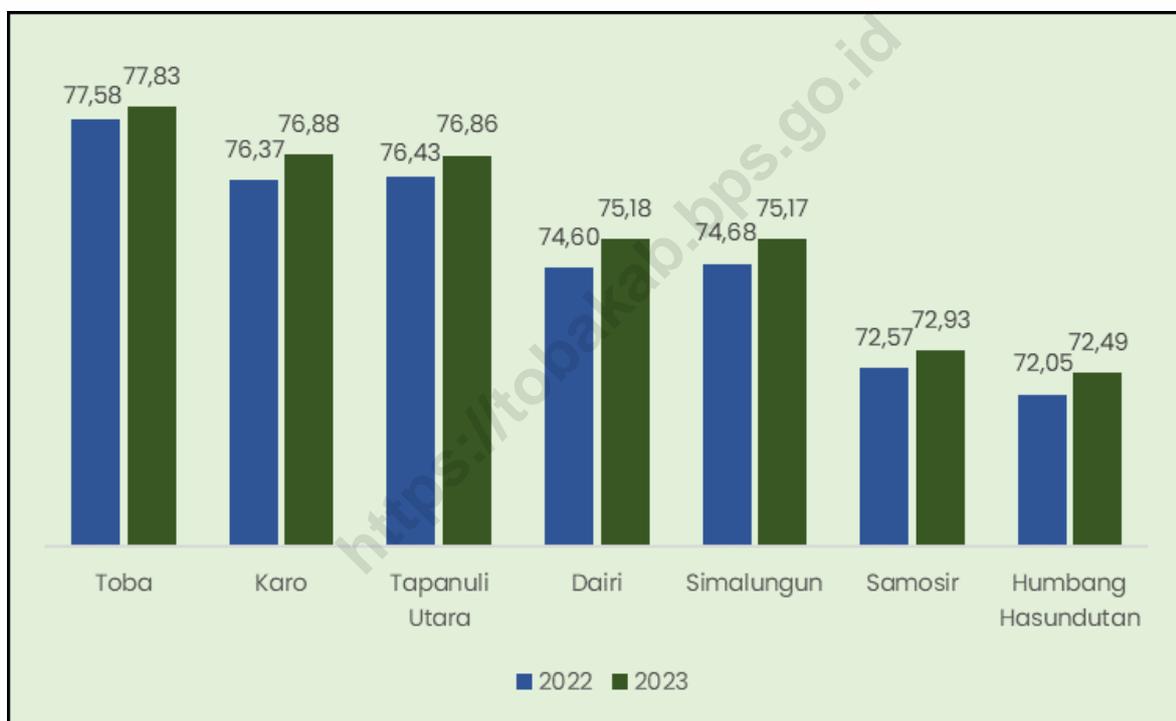


Gambar 4.3. Perbandingan Capaian Pembangunan Manusia di Sumatera Utara Tahun 2023

Apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, maka IPM Kabupaten Toba pada tahun 2023 berada di posisi ke-6 dari 33 kabupaten/kota. Gambar 4.3 menunjukkan bahwa terdapat 2 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki status

pembangunan manusia sangat tinggi yaitu Kota Medan dan Kota Pematangsiantar.

Gambar 4.3 juga menunjukkan bahwa sebagian besar Kabupaten/Kota, yaitu sebanyak 25 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara berada pada status pembangunan manusia tinggi. Sementara untuk 4 Kabupaten/Kota lainnya, yaitu Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, dan Kabupaten Nias Barat berada pada status status pembangunan manusia sedang.



Gambar 4.4. Indeks Pembangunan Manusia di Kawasan Danau Toba Tahun 2022-2023

Kabupaten Toba merupakan salah satu dari tujuh kabupaten yang berada di Kawasan Danau Toba. Tujuh kabupaten/kota yang berada di Kawasan Danau Toba, antara lain Kabupaten Toba, Kabupaten Karo Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Dairi, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Samosir, dan Kabupaten Humbang Hasundutan

Berdasarkan gambar 4.4 dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu dua tahun terakhir, besar IPM Kabupaten Toba menempati posisi pertama dari tujuh kabupaten yang berada di Kawasan Danau Toba. IPM tertinggi kedua di Kawasan Danau Toba ditempati oleh Kabupaten Karo dengan IPM sebesar 76,88 sementara IPM terendah yaitu Kabupaten Humbang Hasundutan dengan IPM sebesar 72,49. Terdapat lima dari tujuh kabupaten yang berada di Kawasan Danau Toba yang memiliki IPM di atas level IPM Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten/Kota yang dimaksud antara lain Kabupaten Toba, Kabupaten Karo, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Dairi, dan Kabupaten Simalungun. Sebaliknya, untuk dua kabupaten lain yakni Kabupaten Samosir dan Kabupaten Humbang Hasundutan masih berada di bawah IPM Provinsi Sumatera Utara.

4.3. Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

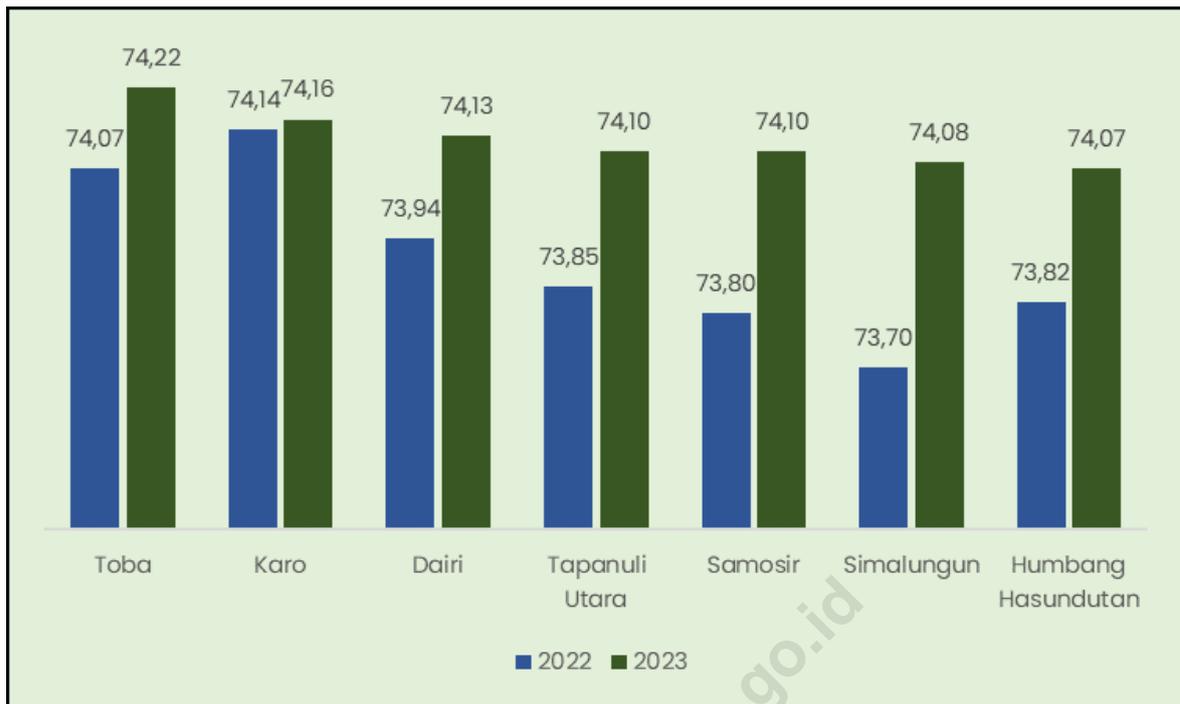
Kesehatan adalah syarat yang harus terpenuhi untuk bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan pendapatan yang layak. Penduduk yang sehat akan memiliki produktivitas yang tinggi sehingga mampu mendukung proses pembangunan ekonomi suatu wilayah. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah terus berupaya meningkatkan derajat kesehatan penduduk dengan meningkatkan fasilitas serta akses kesehatan yang mudah dan terjangkau. Dengan demikian kesadaran penduduk untuk meningkatkan kesehatannya juga akan terwujud. Kondisi kesehatan yang baik akan menyebabkan meningkatnya rata-rata tahun hidup yang akan dijalani seseorang. Dengan meningkatkan kualitas kesehatan, peluang hidup yang diharapkan penduduk menjadi semakin panjang. Indikator yang mampu mencerminkan dimensi umur panjang dan hidup sehat tersebut adalah Umur Harapan Hidup (UHH). Indikator UHH mampu menunjukkan derajat kesehatan masyarakat pada suatu

wilayah. Oleh sebab itu, UHH menjadi salah satu dasar evaluasi kinerja pemerintah dalam rangka peningkatan kesejahteraan khususnya dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. UHH yang tinggi di suatu wilayah mengindikasikan bahwa program pembangunan kesehatan dan program sosial seperti program kecukupan gizi dan kalori sudah berjalan dengan baik.



Gambar 4.5. Perkembangan UHH Kabupaten Toba Tahun 2020-2023 (Tahun)

Kesehatan merupakan salah satu bagian vital dalam kehidupan manusia. Berdasarkan Gambar 4.5 dapat dilihat bahwa UHH Kabupaten Toba mengalami peningkatan setiap tahunnya selama periode waktu tahun 2020 sampai 2023 yang menunjukkan harapan seorang bayi yang baru lahir baik laki-laki maupun perempuan untuk dapat hidup lebih lama menjadi semakin tinggi. Hal ini berarti telah terjadi peningkatan derajat kesehatan penduduk Kabupaten Toba selama periode tahun 2020-2023. UHH Kabupaten Toba Tahun 2023 sebesar 74,22 yang berarti secara rata-rata bayi yang baru lahir di Kabupaten Toba pada tahun 2023 memiliki peluang untuk bertahan hidup sampai hingga usia 74-75 tahun.



Gambar 4.6. Umur Harapan Hidup Kabupaten di Kawasan Danau Toba Tahun 2022 dan 2023 (Tahun)

Gambar 4.6 menunjukkan bahwa tahun 2023 UHH Kabupaten Toba berada di posisi tertinggi di antara kabupaten lainnya yang berada di Kawasan Danau Toba Sumatera Utara. UHH Kabupaten Toba Pada Tahun 2023 yaitu sebesar 74,22 dan sudah lebih tinggi dari UHH Provinsi Sumatera Utara yakni sebesar 73,67 atau terpaut nilai sebesar 0,55 poin. Posisi ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni UHH tertinggi diduduki oleh Kabupaten Karo sebesar 74,14 pada tahun 2022.

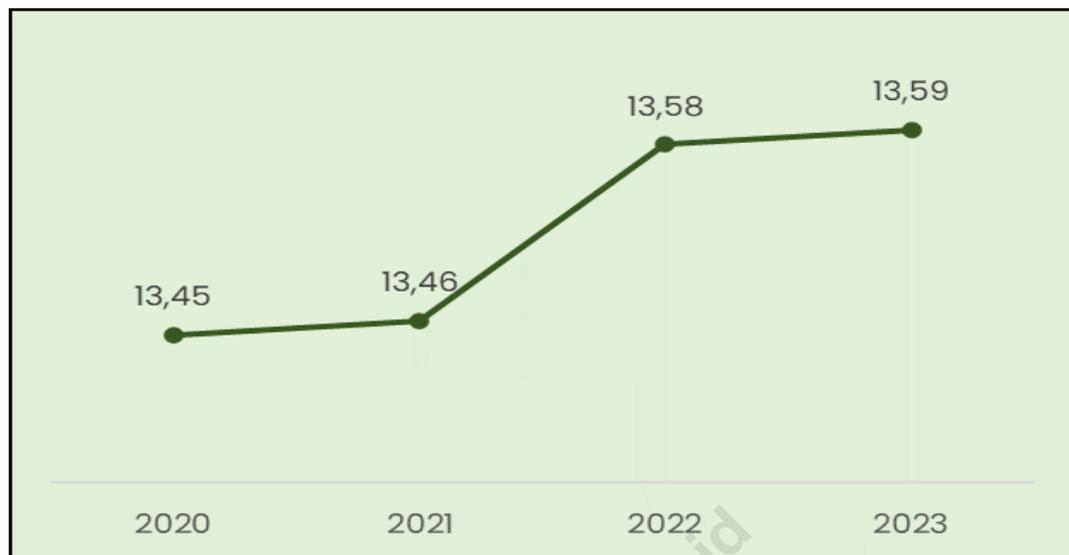
Peningkatan derajat kesehatan masyarakat diduga disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor kesehatan ibu hamil dan balita. Dengan kata lain, semakin dini kesehatan ibu hamil dan balita diperhatikan dengan bekal gizi yang baik, maka taraf kesehatan juga akan membaik. Selain itu, faktor lain yang kemajuan teknologi di bidang kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan serta meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap gaya hidup sehat.

4.4. Dimensi Pengetahuan

Selain dimensi umur panjang dan hidup sehat, dimensi pengetahuan juga memiliki peranan yang penting dalam mempengaruhi pembangunan manusia. Dimensi pengetahuan dicerminkan oleh kualitas pendidikan yang terdiri atas dua indikator, yakni (1) Harapan Lama Sekolah (HLS) dan (2) Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Penduduk yang tercakup dalam RLS adalah penduduk dengan usia 25 tahun ke atas sedangkan HLS penduduk dengan usia 7 tahun ke atas. Indikator RLS dan HLS akan diagregasikan menjadi indeks pendidikan pada perhitungan IPM. Kedua indikator tersebut merupakan representasi dari kemampuan masyarakat dalam mengakses khususnya pendidikan formal. Pendidikan memiliki peranan yang penting bagi bangsa mengingat sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia. Pencapaian pendidikan merupakan salah satu ukuran untuk menilai kesejahteraan suatu masyarakat. Pentingnya pendidikan tersebut tercermin dalam UUD 1945.

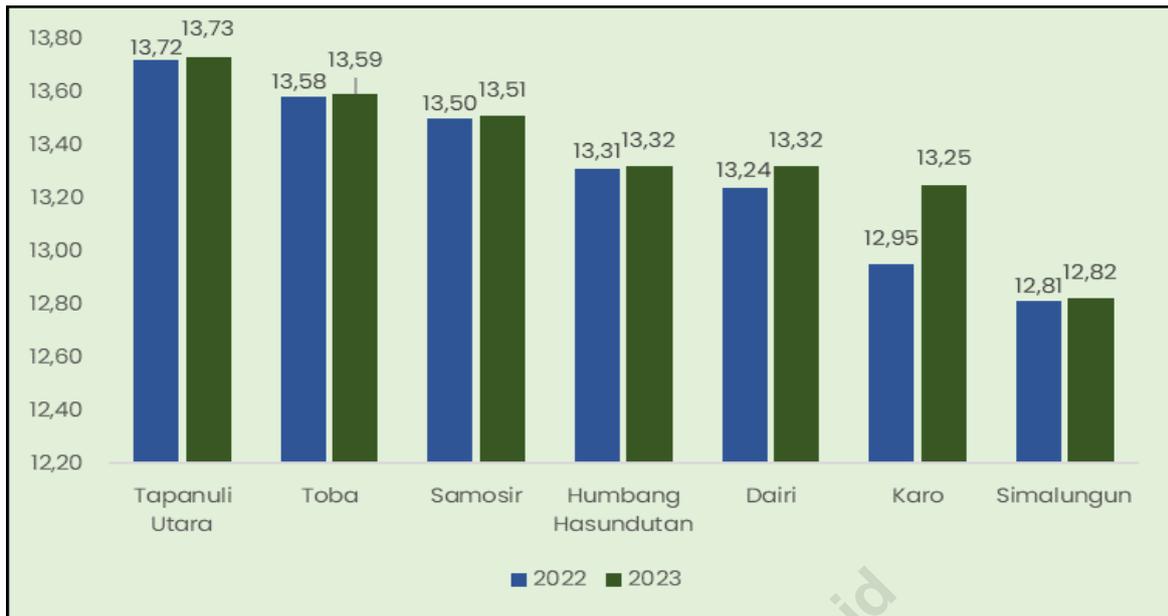
Pendidikan dapat memperluas peluang juga meningkatkan kreativitas dan imajinasi seseorang. Jika dihubungkan dengan indikator lain, maka seseorang yang berpendidikan akan cenderung lebih memperhatikan tingkat kesehatan agar berumur panjang. Secara umum, orang yang berpendidikan juga akan mendapatkan pekerjaan dan pendapatan yang lebih layak. Uraian tersebut menunjukkan bahwa pendidikan memiliki pengaruh terhadap aspek sosial ekonomi. Dengan demikian, pendidikan merupakan sarana penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

1. Indikator Harapan Lama Sekolah (HLS)



Gambar 4.7. Perkembangan HLS Kabupaten Toba Tahun 2020-2023 (Tahun)

Berdasarkan gambar 4.7 dapat dilihat bahwa HLS di Kabupaten Toba terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan HLS dari tahun 2020 hingga tahun 2023 menunjukkan bahwa harapan kualitas pendidikan di Kabupaten Toba mengalami kemajuan. Dengan kata lain, semakin banyak penduduk di Kabupaten Toba yang berkeinginan kuat untuk bersekolah. Harapan lama sekolah Kabupaten Toba pada tahun 2023 sebesar 13,59. Artinya, secara rata-rata penduduk usia 7 tahun yang baru saja menempuh pendidikan formal pada tahun 2023 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13-14 tahun atau setara dengan jenjang pendidikan D1.



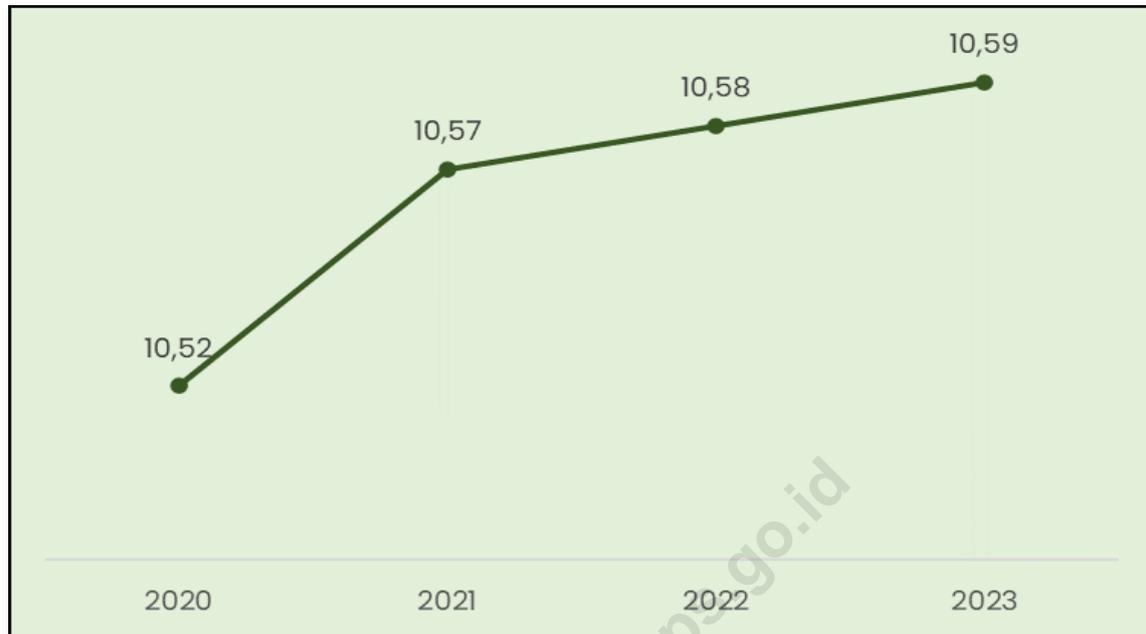
Gambar 4.8. HLS Kabupaten di Kawasan Danau Toba Tahun 2022 dan 2023 (Tahun)

Berdasarkan gambar 4.8, HLS Kabupaten Toba berada di posisi kedua tertinggi di Kawasan Danau Toba setelah Kabupaten Tapanuli Utara. Selain itu HLS Kabupaten Toba pada tahun 2023 yaitu sebesar 13,59 berada di atas level HLS Provinsi Sumatera Utara yakni sebesar 13,48 atau berbeda sebesar 0,11 poin. Kabupaten di Kawasan Danau Toba dengan HLS paling tinggi adalah Kabupaten Tapanuli Utara. Sebaliknya, Kabupaten Simalungun merupakan kabupaten dengan HLS yang paling rendah.

2. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

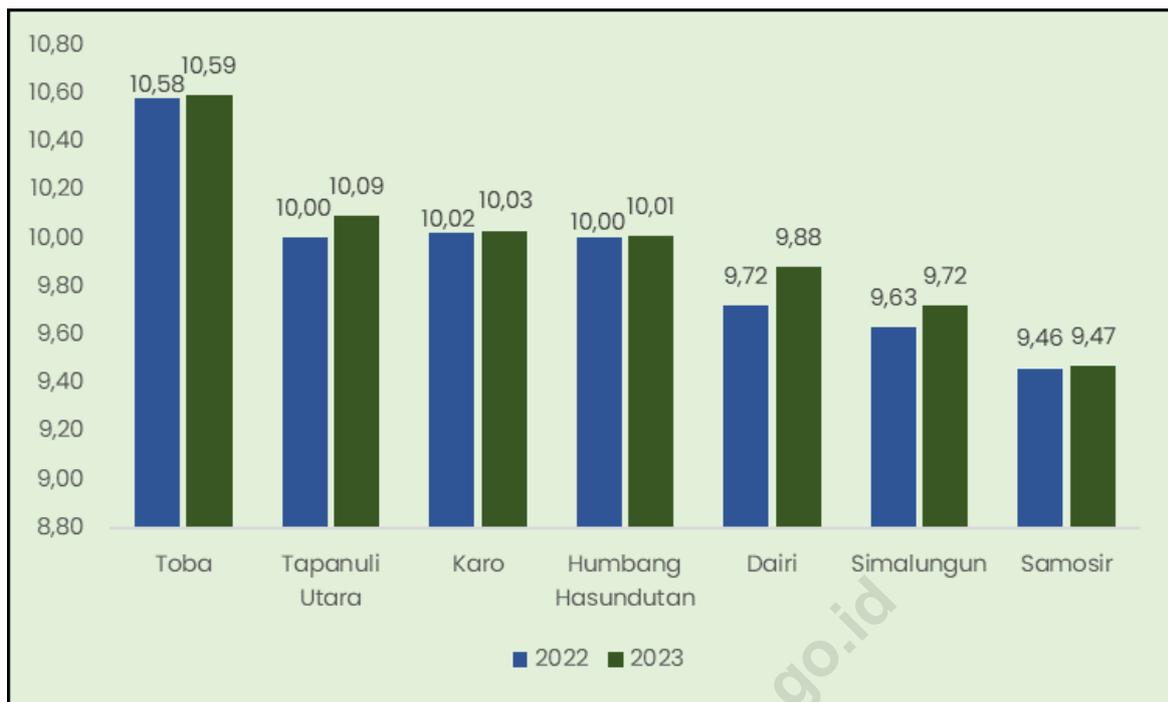
RLS merupakan rata-rata banyak tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas menempuh pendidikan formal. RLS yang tinggi mengindikasikan bahwa semakin tinggi pendidikan formal yang dicapai oleh masyarakat di suatu wilayah. Peningkatan kualitas SDM melalui bidang pendidikan, diwujudkan pemerintah melalui berbagai kebijakan, antara lain pelaksanaan program wajib belajar (Wajar) 6 tahun yang telah dilaksanakan

sejak tahun 1984, kemudian ditingkatkan dengan Wajib Pendidikan Dasar 9 tahun pada tahun 1994.



Gambar 4.9. Perkembangan RLS Kabupaten Toba Tahun 2020–2023 (Tahun)

Berdasarkan gambar 4.9 dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan RLS periode tahun 2020–2023 di Kabupaten Toba. Pada tahun 2023 RLS Kabupaten Toba sebesar 10,59 tahun. Artinya, secara rata-rata penduduk Kabupaten Toba usia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan formal selama 10–11 tahun atau menamatkan bangku kelas satu SMA. Pada tahun 2023 RLS naik sebesar 0,01 poin. Peningkatan RLS paling tinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 0,05 poin, dari 10,52 tahun pada tahun 2020 menjadi 10,57 tahun pada tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2022 dan 2023 kenaikannya hanya 0,01 per tahun. Artinya, RLS Tahun 2023 dan 2022 mengalami perlambatan pertumbuhan dibanding tahun 2021. Hal tersebut menjadi catatan penting kepada Kabupaten Toba dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas untuk mewujudkan kesejahteraan manusia.

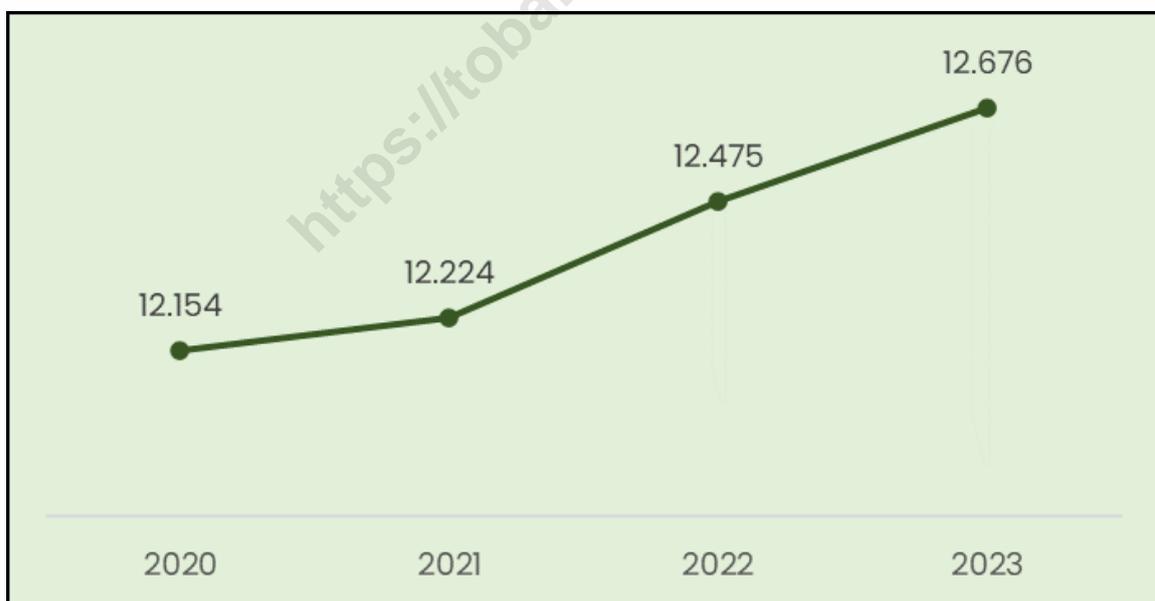


Gambar 4.10. RLS Kabupaten di Kawasan Danau Toba Tahun 2022 dan 2023 (Tahun)

Berdasarkan gambar 4.10 dapat dilihat bahwa perbandingan RLS kabupaten yang berada di Kawasan Danau Toba. Gambar tersebut menunjukkan bahwa RLS Kabupaten Toba pada tahun 2023 berada di posisi tertinggi dibandingkan dengan Kabupaten lainnya di Kawasan Danau Toba yaitu sebesar 10,59 tahun. Diikuti oleh Kabupaten Tapanuli Utara yakni sebesar 10,09 tahun. Sebaliknya, RLS yang paling rendah di Kawasan Danau Toba adalah Kabupaten Samosir sebesar 9,47 tahun. Jika dibandingkan dengan Provinsi, maka terdapat dua kabupaten dengan RLS di bawah RLS Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2023 yakni sebesar 9,82, yaitu Kabupaten Samosir dan Kabupaten Simalungun.

4.5. Dimensi Standar Hidup Layak

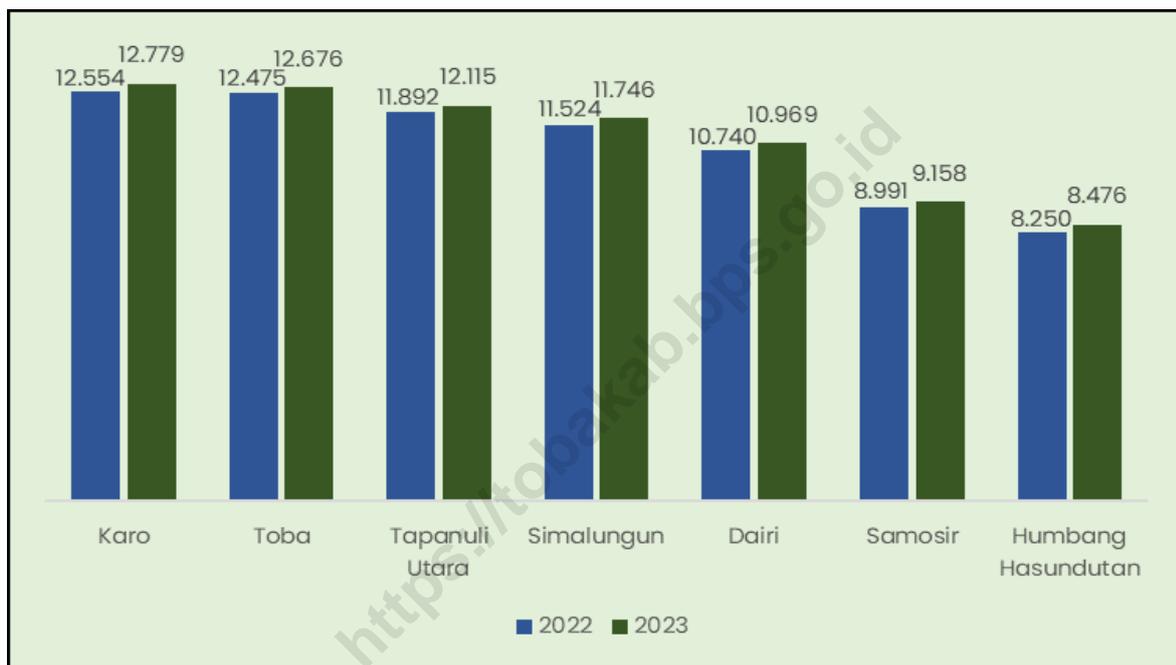
Kemampuan daya beli masyarakat mencerminkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup agar dapat memenuhi standar hidup yang layak. Peningkatan pendapatan seseorang diharapkan mendorong kemampuan daya beli dengan asumsi tidak dibarengi dengan kenaikan harga barang atau jasa yang lebih tinggi dari kenaikan pendapatan tersebut. Indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan daya beli masyarakat adalah pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Indonesia melakukan penyesuaian pada indikator PNB per kapita mengacu pada standar UNDP yang adalah cerminan dimensi standar hidup layak. Hal tersebut disebabkan ketidaktersediaan data PNB per kapita di tingkat kabupaten/kota sehingga diganti dengan indikator pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan.



Gambar 4.11. Perkembangan Pengeluaran Riil per Kapita Kabupaten Toba Tahun 2020–2023 (Ribuan Rupiah)

Dimensi standar hidup layak dalam perhitungan IPM diwakili oleh indikator pengeluaran riil per kapita. Secara umum pengeluaran riil per kapita Kabupaten Toba 2020–2023 mengalami peningkatan seperti yang

dapat dilihat pada gambar 4.11. Hal tersebut menggambarkan bahwa kesejahteraan penduduk Kabupaten Toba dari tahun ke tahun semakin membaik. Pada tahun 2023 pengeluaran riil per kapita di Kabupaten Toba mengalami pertumbuhan sekitar 1,61 persen. Pertumbuhan tersebut mengalami perlambatan dengan pertumbuhan di tahun sebelumnya, yakni tahun 2022 dengan pertumbuhan pengeluaran riil per kapita sebesar 2,05 persen.



Gambar 4.12. Pengeluaran Riil per Kapita Kabupaten di Kawasan Danau Toba Tahun 2022 dan 2023 (Ribu Rupiah)

Pengeluaran Riil per kapita Kabupaten Toba tahun 2023 apabila dibandingkan dengan kabupaten lain yang berada di Kawasan Danau Toba berada di posisi kedua tertinggi. Kabupaten dengan pengeluaran per kapita tertinggi adalah Kabupaten Karo sebesar 12.779.000 rupiah sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Humbang Hasundutan yakni sebesar 8.476.000 rupiah. Tingkat pengeluaran riil per kapita Kabupaten Toba pada tahun 2023 yakni sebesar 12.676.000 rupiah berada diatas pengeluaran riil per kapita Provinsi Sumatera Utara yakni sebesar 11.049.000 rupiah.

LAMPIRAN

<https://www.kab.bps.go.id>

Lampiran 1. Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) Menggunakan Hasil SP2010 Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Utara 2020-2023 (Tahun)

Provinsi/Kabupaten/Kota	UHH SP2010			
	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sumatera Utara	69,10	69,23	69,61	69,98
Nias	69,75	69,78	70,06	70,34
Mandailing Natal	62,60	62,65	63,05	63,47
Tapanuli Selatan	64,91	64,97	65,28	65,56
Tapanuli Tengah	67,15	67,24	67,58	67,90
Tapanuli Utara	68,63	68,76	69,16	69,57
Toba	70,08	70,29	70,76	71,24
Labuhan Batu	69,93	69,95	70,37	70,77
Asahan	68,26	68,37	68,73	69,09
Simalungun	71,22	71,37	71,78	72,20
Dairi	69,00	69,19	69,64	70,11
Karo	71,40	71,58	72,03	72,28
Deli Serdang	71,73	71,77	72,07	72,31
Langkat	68,80	68,97	69,39	69,64
Nias Selatan	68,74	68,86	69,21	69,58
Humbang Hasundutan	69,27	69,51	70,02	70,27
Pakpak Bharat	65,74	65,96	66,44	66,89
Samosir	71,27	71,41	71,82	72,24
Serdang Bedagai	68,68	68,82	69,21	69,59
Batu Bara	66,96	67,13	67,55	67,88
Padang Lawas Utara	67,17	67,22	67,53	67,82
Padang Lawas	67,09	67,13	67,43	67,71
Labuhan Batu Selatan	68,71	68,81	69,16	69,54
Labuhan Batu Utara	69,46	69,56	69,91	70,25
Nias Utara	69,43	69,55	69,90	70,24
Nias Barat	68,96	69,08	69,43	69,96
Kota Sibolga	69,01	69,25	69,77	70,18
Kota Tanjung Balai	63,27	63,44	63,87	64,28
Kota Pematang Siantar	73,55	73,77	74,25	74,75
Kota Tebing Tinggi	70,87	70,95	71,29	71,63
Kota Medan	73,14	73,23	73,58	73,93
Kota Binjai	72,38	72,45	72,79	73,13
Kota Padangsidimpuan	69,41	69,50	69,84	70,20
Kota Gunungsitoli	71,19	71,32	71,71	72,09

Lampiran 2. Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) Menggunakan Hasil LF-SP2020 Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Utara 2020-2023 (Tahun)

Provinsi/Kabupaten/Kota	UHH LF-SP2020			
	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sumatera Utara	73,00	73,10	73,39	73,67
Nias	71,27	71,29	71,52	71,74
Mandailing Natal	70,95	71,00	71,35	71,72
Tapanuli Selatan	71,00	71,06	71,35	71,61
Tapanuli Tengah	71,07	71,16	71,47	71,76
Tapanuli Utara	73,35	73,48	73,85	74,10
Toba	73,44	73,64	74,07	74,22
Labuhan Batu	72,20	72,21	72,55	72,88
Asahan	72,64	72,74	73,07	73,39
Simalungun	73,21	73,34	73,70	74,08
Dairi	73,35	73,53	73,94	74,13
Karo	73,44	73,64	74,14	74,16
Deli Serdang	73,13	73,17	73,44	73,65
Langkat	73,35	73,54	74,02	74,14
Nias Selatan	70,88	70,98	71,29	71,61
Humbang Hasundutan	73,31	73,60	73,82	74,07
Pakpak Bharat	71,46	71,68	72,16	72,61
Samosir	73,31	73,44	73,80	74,10
Serdang Bedagai	72,27	72,40	72,76	73,11
Batu Bara	71,68	71,86	72,29	72,63
Padang Lawas Utara	71,00	71,04	71,32	71,57
Padang Lawas	70,98	71,01	71,27	71,52
Labuhan Batu Selatan	71,76	71,84	72,14	72,46
Labuhan Batu Utara	73,41	73,50	73,81	74,06
Nias Utara	71,39	71,50	71,81	72,12
Nias Barat	71,56	71,65	71,91	72,30
Kota Sibolga	72,97	73,21	73,75	74,02
Kota Tanjung Balai	73,08	73,25	73,70	74,01
Kota Pematang Siantar	73,55	73,77	74,27	74,75
Kota Tebing Tinggi	73,42	73,49	73,78	74,07
Kota Medan	73,81	73,97	74,32	74,76
Kota Binjai	73,55	73,62	73,92	74,18
Kota Padangsidimpuan	72,86	72,93	73,23	73,54
Kota Gunungsitoli	73,22	73,34	73,69	74,03

Lampiran 3. Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara 2020-2023 (Tahun)

Provinsi/Kabupaten/Kota	HLS			
	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sumatera Utara	13,23	13,27	13,31	13,48
Nias	12,57	12,84	13,04	13,30
Mandailing Natal	13,32	13,61	13,85	13,86
Tapanuli Selatan	13,24	13,35	13,37	13,58
Tapanuli Tengah	13,06	13,07	13,24	13,49
Tapanuli Utara	13,69	13,70	13,72	13,73
Toba	13,45	13,46	13,58	13,59
Labuhan Batu	12,73	12,74	12,95	13,25
Asahan	12,60	12,61	12,63	12,64
Simalungun	12,78	12,79	12,81	12,82
Dairi	13,10	13,11	13,24	13,32
Karo	12,76	12,77	12,95	13,25
Deli Serdang	13,35	13,36	13,38	13,39
Langkat	13,05	13,24	13,26	13,27
Nias Selatan	12,23	12,27	12,48	12,78
Humbang Hasundutan	13,28	13,29	13,31	13,32
Pakpak Bharat	13,86	13,87	13,89	13,90
Samosir	13,47	13,48	13,50	13,51
Serdang Bedagai	12,60	12,61	12,63	12,64
Batu Bara	12,63	12,64	12,93	13,11
Padang Lawas Utara	12,87	13,04	13,23	13,53
Padang Lawas	13,03	13,27	13,41	13,70
Labuhan Batu Selatan	13,00	13,01	13,12	13,42
Labuhan Batu Utara	13,04	13,19	13,29	13,57
Nias Utara	13,03	13,04	13,06	13,36
Nias Barat	12,94	12,95	12,97	12,98
Kota Sibolga	13,16	13,28	13,30	13,42
Kota Tanjung Balai	12,50	12,62	12,90	13,14
Kota Pematang Siantar	14,45	14,57	14,59	14,60
Kota Tebing Tinggi	12,72	12,73	12,91	13,12
Kota Medan	14,74	14,75	14,77	14,78
Kota Binjai	13,62	13,63	13,87	14,17
Kota Padangsidimpuan	14,54	14,56	14,58	14,59
Kota Gunungsitoli	13,74	13,75	13,77	13,78

Lampiran 4. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara 2020-2023 (Tahun)

Provinsi/Kabupaten/Kota	RLS			
	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sumatera Utara	9,54	9,58	9,71	9,82
Nias	5,36	5,64	5,88	6,14
Mandailing Natal	8,62	8,63	8,76	8,84
Tapanuli Selatan	9,28	9,29	9,34	9,51
Tapanuli Tengah	8,62	8,84	8,86	8,87
Tapanuli Utara	9,85	9,99	10,00	10,09
Toba	10,52	10,57	10,58	10,59
Labuhan Batu	9,24	9,25	9,40	9,49
Asahan	8,79	8,80	8,82	8,83
Simalungun	9,60	9,61	9,63	9,72
Dairi	9,58	9,59	9,72	9,88
Karo	9,79	10,00	10,02	10,03
Deli Serdang	10,09	10,10	10,27	10,28
Langkat	8,65	8,66	8,68	8,73
Nias Selatan	5,85	6,06	6,23	6,48
Humbang Hasundutan	9,54	9,71	10,00	10,01
Pakpak Bharat	9,03	9,14	9,39	9,61
Samosir	9,43	9,44	9,46	9,47
Serdang Bedagai	8,54	8,69	8,71	8,85
Batu Bara	8,06	8,07	8,26	8,50
Padang Lawas Utara	9,37	9,38	9,46	9,55
Padang Lawas	9,01	9,02	9,31	9,43
Labuhan Batu Selatan	8,75	8,90	8,92	8,93
Labuhan Batu Utara	8,40	8,41	8,64	8,87
Nias Utara	6,58	6,77	6,78	6,85
Nias Barat	6,49	6,69	6,97	7,07
Kota Sibolga	10,40	10,41	10,43	10,44
Kota Tanjung Balai	9,44	9,45	9,55	9,68
Kota Pematang Siantar	11,16	11,29	11,31	11,58
Kota Tebing Tinggi	10,31	10,44	10,65	10,86
Kota Medan	11,39	11,48	11,50	11,62
Kota Binjai	10,93	10,94	11,18	11,19
Kota Padangsidimpuan	11,00	11,09	11,11	11,12
Kota Gunungsitoli	8,61	8,62	8,64	8,65

Lampiran 5. Pengeluaran Riil per Kapita disesuaikan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara 2020-2023 (Ribu Rupiah)

Provinsi/Kabupaten/Kota	Pengeluaran Riil per Kapita			
	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sumatera Utara	10.420	10.499	10.848	11.049
Nias	6.898	6.995	7.196	7.301
Mandailing Natal	9.684	9.771	10.061	10.251
Tapanuli Selatan	11.236	11.304	11.727	11.829
Tapanuli Tengah	10.071	10.138	10.495	10.690
Tapanuli Utara	11.648	11.710	11.892	12.115
Toba	12.154	12.224	12.475	12.676
Labuhan Batu	11.150	11.212	11.474	11.670
Asahan	10.890	11.030	11.515	11.795
Simalungun	11.308	11.376	11.524	11.746
Dairi	10.350	10.504	10.740	10.969
Karo	12.349	12.412	12.554	12.779
Deli Serdang	12.225	12.291	12.657	12.890
Langkat	11.071	11.142	11.439	11.632
Nias Selatan	6.974	7.041	7.195	7.299
Humbang Hasundutan	7.850	8.016	8.250	8.476
Pakpak Bharat	8.170	8.254	8.558	8.764
Samosir	8.422	8.504	8.991	9.158
Serdang Bedagai	10.950	11.017	11.499	11.695
Batu Bara	10.410	10.539	10.755	10.933
Padang Lawas Utara	9.987	10.055	10.447	10.615
Padang Lawas	8.807	8.921	9.207	9.395
Labuhan Batu Selatan	11.495	11.562	11.751	11.950
Labuhan Batu Utara	11.779	11.840	12.258	12.429
Nias Utara	6.064	6.155	6.575	6.788
Nias Barat	5.830	5.924	6.152	6.382
Kota Sibolga	11.473	11.540	12.135	12.285
Kota Tanjung Balai	11.132	11.225	11.589	11.753
Kota Pematang Siantar	12.372	12.436	12.744	12.984
Kota Tebing Tinggi	12.876	12.939	13.144	13.385
Kota Medan	14.890	14.999	15.503	15.674
Kota Binjai	10.997	11.063	11.358	11.567
Kota Padangsidimpuan	10.856	10.965	11.337	11.552
Kota Gunungsitoli	7.980	8.134	8.434	8.635

Lampiran 6. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara 2020-2023 (Menggunakan UHH Hasil SP2010)

Provinsi/Kabupaten/Kota	IPM (UHH SP2010)			
	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sumatera Utara	71,77	72,00	72,71	73,37
Nias	61,93	62,74	63,69	64,56
Mandailing Natal	66,79	67,19	68,05	68,56
Tapanuli Selatan	70,12	70,33	70,92	71,55
Tapanuli Tengah	69,23	69,61	70,31	70,91
Tapanuli Utara	73,47	73,76	74,14	74,65
Toba	75,16	75,39	75,96	76,38
Labuhan Batu	72,01	72,09	72,92	73,69
Asahan	70,29	70,49	71,13	71,56
Simalungun	73,25	73,40	73,77	74,29
Dairi	71,57	71,84	72,56	73,27
Karo	74,43	74,83	75,36	75,98
Deli Serdang	75,44	75,53	76,19	76,52
Langkat	71,00	71,35	71,86	72,21
Nias Selatan	61,89	62,35	63,17	64,12
Humbang Hasundutan	68,87	69,41	70,32	70,75
Pakpak Bharat	67,59	67,94	68,85	69,58
Samosir	70,63	70,83	71,67	72,08
Serdang Bedagai	70,24	70,56	71,21	71,75
Batu Bara	68,36	68,58	69,51	70,31
Padang Lawas Utara	69,85	70,11	70,93	71,63
Padang Lawas	68,25	68,64	69,58	70,34
Labuhan Batu Selatan	71,40	71,69	72,16	72,82
Labuhan Batu Utara	71,61	71,87	72,77	73,63
Nias Utara	62,36	62,82	63,75	64,64
Nias Barat	61,51	61,99	62,93	63,70
Kota Sibolga	73,63	73,94	74,74	75,20
Kota Tanjung Balai	68,65	68,94	69,86	70,59
Kota Pematang Siantar	78,75	79,17	79,70	80,46
Kota Tebing Tinggi	75,17	75,42	76,17	76,98
Kota Medan	80,98	81,21	81,76	82,19
Kota Binjai	75,89	76,01	76,95	77,60
Kota Padangsidimpuan	75,22	75,48	76,05	76,44
Kota Gunungsitoli	69,31	69,61	70,23	70,68

Lampiran 7. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara 2020-2023 (Menggunakan UHH Hasil LF-SP2020)

Provinsi/Kabupaten/Kota	IPM (UHH LF-SP2020)			
	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sumatera Utara	73,62	73,84	74,51	75,13
Nias	62,55	63,37	64,30	65,15
Mandailing Natal	70,89	71,31	72,17	72,65
Tapanuli Selatan	73,16	73,37	73,96	74,58
Tapanuli Tengah	71,10	71,48	72,18	72,77
Tapanuli Utara	75,77	76,06	76,43	76,86
Toba	76,81	77,03	77,58	77,83
Labuhan Batu	73,08	73,16	73,96	74,70
Asahan	72,35	72,55	73,18	73,59
Simalungun	74,19	74,33	74,68	75,17
Dairi	73,63	73,89	74,60	75,18
Karo	75,40	75,81	76,37	76,88
Deli Serdang	76,11	76,21	76,86	77,16
Langkat	73,14	73,50	74,03	74,33
Nias Selatan	62,78	63,24	64,05	64,98
Humbang Hasundutan	70,70	71,28	72,05	72,49
Pakpak Bharat	70,30	70,65	71,57	72,30
Samosir	71,56	71,75	72,57	72,93
Serdang Bedagai	71,93	72,25	72,89	73,40
Batu Bara	70,57	70,80	71,75	72,56
Padang Lawas Utara	71,69	71,96	72,77	73,45
Padang Lawas	70,08	70,48	71,41	72,16
Labuhan Batu Selatan	72,86	73,15	73,59	74,23
Labuhan Batu Utara	73,47	73,73	74,61	75,45
Nias Utara	63,17	63,63	64,55	65,44
Nias Barat	62,58	63,05	63,96	64,68
Kota Sibolga	75,56	75,87	76,69	77,07
Kota Tanjung Balai	73,48	73,78	74,73	75,42
Kota Pematang Siantar	78,75	79,17	79,71	80,46
Kota Tebing Tinggi	76,40	76,65	77,39	78,17
Kota Medan	81,31	81,58	82,13	82,61
Kota Binjai	76,45	76,57	77,50	78,11
Kota Padangsidimpuan	76,93	77,19	77,73	78,10
Kota Gunungsitoli	70,22	70,51	71,11	71,55

ST 2023

SENSUS PERTANIAN
CENSUS OF AGRICULTURE

BerAKHLAK

orientasi Pelayanan • kuantabel • kompeten
harmonis • loyal • adaptif • kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN TOBA**

Jl. Somba Debata No.5, Onan Raja - Balige

Telp (0632) 21480 Fax (0632) 322194, bps 1206@bps.go.id

<https://tobakab.bps.go.id>